

Hari

"Hotel transit yang dipilih berlokasi di wilayah Aziziyah, agar dekat dengan Klinik Kesehatan Haji Indonesia (KKHI) Daerah Kerja Makkah," sebut Kepala Bidang Layanan Jemaah Lansia dan Disabilitas, Slamet Sodali di Makkah, kemarin.

Menurut Slamet, 300 jemaah lansia dan disabilitas diikutkan dalam safari wukuf setelah proses seleksi berdasarkan kriteria yang telah dirumuskan. Ada lima kriteria jemaah haji lansia dan disabilitas yang bisa mengikuti safari wukuf lansia non-mandiri, yaitu jemaah haji lansia dan disabilitas

yang tidak mandiri dalam melakukan aktivitas sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan dasarnya seperti makan, minum, mandi dan mobilisasi. Kemudian, jemaah haji lansia dan disabilitas yang tidak bisa berjalan atau menggunakan kursi roda karena sakit dan memerlukan perawatan lebih lanjut.

Berikutnya jemaah haji lansia dan disabilitas yang memiliki komorbid penyakit kronis seperti jantung, hipertensi, stroke (sedang-berat). Jemaah haji lansia dan disabilitas yang pulang setelah mendapat perawatan dari Klinik Kesehatan Haji

Indonesia (KKHI) dan masih dalam kondisi lemah. Terakhir, jemaah haji lansia dan disabilitas sesuai dengan kriteria risiko tinggi yang ditentukan petugas kloter. "Pemindahan ke hotel transit sengaja dilakukan lebih awal agar tidak terburu-buru dan jemaah lebih nyaman. Fasilitas hotel juga kita buat nyaman mungkin seperti di rumah, konsepnya mirip apartemen," lanjut Slamet.

Pihaknya telah menyiapkan sejumlah petugas untuk mendampingi jemaah selama di hotel transit.

(Jon/Ati)-f

Dulu

Mendengar kabar itu, Wasita mengaku galau. Meskipun demikian ia masih tetap menjadi bagian dari Ji. Bahkan pada tahun 2013, ia dikirim ke Suriah oleh Ji selama satu bulan. "Karena berada di daerah konflik, di sana saya dibekali kemampuan memegang senjata. Ya saya membawa senjata api beneran," kisahnya.

Hingga akhirnya, Wasita yang menangani bagian kontrol kegiatan di organisasi Ji itu pun ditangkap oleh Densus. "Saya ditangkap 30 September 2020, karena keterlibatan saya menjadi anggota Ji. Ada beberapa orang lainnya yang saat itu terjerat kasus yang sama. Tertangkapnya saya saat itu, mungkin jalan terbaik yang

kemudian membawa saya kembali bersama keluarga," ujarnya.

Wasita menyebut, sejak tahun 1994, istri dan anak-anaknya tidak tahu jika dirinya tergabung di Ji. Sang istri, baru mengetahui aktivitas suaminya itu saat Wasita selesai menjalani hukuman pada tahun 2023. "Karena di Ji, ada aturan kalau istri tidak boleh tahu. Ya setahu istri, selama itu saya bekerja. Bahkan saat saya ke Suriah, istri tidak tahu, tahunya saya bekerja," ucapnya. Namun Wasita bisa bernapas lega. Meski menyandang status sebagai eks Napiter, sang istri masih mau menerimanya. "Istri tahu bagaimana saya, yang penting saya sekarang berubah," ujarnya.

Tambang

PT Kaltim Prima Coal, PT Adaro Energy Tbk, PT Multi Harapan Utama (MAU), dan PT Kideco Jaya Agung.

Kebijakan Jokowi itu lebih sarat kepentingan politik ketimbang kepentingan ekonomi, yang konon merupakan realisasi janji kampanye Jokowi. Pemberian WIUPK ditengarai untuk meninggalkan legasi agar Jokowi tetap dijaga oleh umat Ormas Keagamaan pasca lengser sebagai RI-1 pada Oktober mendatang. Belum secara resmi WIUPK diserahkan ke NU, Ketua Umum Gerakan Pemuda (GP) Ansor, Addin Jauharuddin menyatakan, GP Ansor dan Barisan Ansor Serbaguna (Banser) akan bertindak bila ada pihak-pihak yang menyakiti Presiden Jokowi dan Keluarga.

Kebijakan pemberian WIUPK kepada Ormas Keagamaan sung-

guh sangat tidak tepat, bahkan cenderung blunder, paling tidak ada 3 alasan. Pertama, kebijakan itu berpotensi melabrak UUD 1945 dan UU Minerba. Pasal 33 UUD 1945 mengatakan bahwa Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Penguasaan oleh negara bisa diserahkan kepada BUMN, BUMD dan Perusahaan Swasta dengan kompensasi pembayaran royalti, pajak dan pungutan lainnya. Sedangkan distribusi hasilnya untuk kemakmuran rakyat harus dilakukan oleh negara melalui APBN, tidak bisa diserahkan kepada Ormas Keagamaan. Demikian juga dengan UU Minerba mengamanahkan pemberian prioritas lahan bekas hanya diberikan kepada

Sambungan hal 1

BUMN dan BUMD, bukan Ormas Keagamaan. Kedua, Ormas Keagamaan tidak memiliki pengalaman, kapasitas dan kemampuan dana untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi pertambangan. Dalam kondisi tersebut, dengan berbagai cara diperkirakan Ormas Keagamaan hanya akan berperan sebagai broker alias makelar dengan mengalihkan WIUPK kepada perusahaan tambang swasta. Ketiga, usaha pertambangan di Indonesia masih berada pada wilayah abu-abu (gray areas) yang penuh dengan tidak pidana kejahatan pertambangan hitam. Kalau Ormas Keagamaan harus menjalankan sendiri usaha pertambangan, tidak disangkal lagi Ormas Keagamaan akan memasuki wilayah abu-abu, yang berpotensi menyeret Ormas Keagamaan ke

Sambungan hal 1

la berpesan agar eks Napiter tidak dikucilkan atau dijauhi karena mereka punya potensi yang bisa diarahkan ke hal-hal yang positif. Dalam kesempatan itu, Wasita mengucapkan terima kasih kepada Polri, khususnya Polda DIY karena selama bermasalah dengan hukum, anak-anaknya berada di naungan Yayasan Bumi Damai milik anggota Polda DIY, Ipda Ali Suwandi. "Pak Ali juga yang meyakinkan kepada saya untuk menjadi warga negara yang baik dan manusia yang bermanfaat. Saya bahkan saat ini diberi kesempatan untuk mengajar ngaji di Yayasan Bumi Damai," pungkas Wasita.

(Ayu)-d

RANGKAIAN KONFERENSI INTERNASIONAL DI UJB

Studium Generale Soal IoT dan AI

YOGYA (KR) - Universitas Janabadra Yogyakarta (UJB) mengadakan Studium Generale bertema 'IoT & AI in Law, Engineering, Economics, and Agriculture' di Auditorium KPH Poerwokosoemo, Kampus Pusat UJB, Kamis (13/6). Acara ini menghadirkan pembicara Dr Vikas Kumar, Presiden Society for Education and Research Development/SERD) dipandu moderator Winamo SH.



KR-Devid Permana

Studium Generale di UJB Yogyakarta.

Acara ini merupakan salah satu implementasi kerja sama internasional UJB dengan SERD dan beberapa Perguruan Tinggi Asing. Peserta studium generale merupakan mahasiswa dan dosen UJB. Turut hadir Rektor UJB Dr Risdiyanto, para Wakil Rektor, Dekan dan Ketua Program Studi.

Vikas Kumar menyampaikan materi terkait definisi IoT, penggunaan IoT, transisi dari industri 4.0 ke 5.0, pertimbangan etis otomatisasi, tan-

bilan keputusan dan penyelesaian yang lebih cerdas dalam operasi manufaktur dan rantai pasokan," katanya.

Ketua Panitia Studium Generale/Kepala Kerja Sama, Humas dan KUI UJB B Tresno Sumbodo mengatakan, acara ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran mahasiswa dan dosen akan pentingnya peran IoT dan AI dalam mengubah berbagai sektor penting di Indonesia dan dunia.

(Dev)-d

Tak

Sultan meminta kepada kabupaten untuk memastikan bahwa proyek investasi yang dijalankan di daerah berjalan sesuai peraturan yang berlaku. Pasalnya semua proses penerimaan izin investasi sepenuhnya menjadi kewenangan Pemkab Gunungkidul.

(Ria)-f



Prakiraan Cuaca Jumat, 14 Juni 2024

Lokasi	Pagi	Siang	Malam	Dim Hari	Suhu C	Kelembaban
Bantul	☁	☁	☁	☁	22-30	65-95
Sleman	☁	☁	☁	☁	22-29	65-95
Wates	☁	☁	☁	☁	22-29	65-95
Wonosari	☁	☁	☁	☁	22-30	65-95
Yogyakarta	☁	☁	☁	☁	22-30	65-95

EKONOMI

Permendag 8/2024 Permudah Pelaku Usaha



KR-Istimedia

Astra Motor selaku main dealer sepeda motor Honda baru saja meresmikan peletakan batu pertama Astra Motor Safety Riding Center (SRC) Jawa Tengah di area Bukit Semarang Baru (BSB). Chief Executive Astra Motor Robien Tony mengatakan, Astra Motor Safety Riding Center Jateng ini digunakan sebagai tempat melatih kemampuan berkendara yang benar dan aman bagi semua kalangan, mulai dari anak-anak hingga dewasa. Dibangun di atas lahan seluas 1 hektare. Dalam gambar jajaran direksi sedang melakukan peletakan batu pertama, baru-baru ini.

JAKARTA (KR) - Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Jerry Sambuaga mengatakan, Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No 8 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor dibuat untuk mempermudah pelaku usaha, bukan malah mempersulit.

"Prinsipnya Permendag 8 ini untuk mempermudah dan ini bisa di cek di beberapa asosiasi dan juga beberapa pelaku usaha yang menyambut baik, karena lebih simpel, cepat dan lebih banyak kesempatan untuk men-submit secara efisien," ujar Jerry di Jakarta, Kamis (13/6).

Dengan Permendag 8/2024, lanjut Jerry, komoditas-komoditas yang tidak memerlukan pertimbangan teknis (Pertek) cukup dengan persetujuan

impor (PI) dari Kementerian Perdagangan (Kemendag). Namun, tidak dapat dipungkiri, masih ada juga produk-produk yang masih membutuhkan Pertek seperti barang-barang tekstil.

Kemendag sendiri tidak memiliki wewenang untuk mengeluarkan pertek. Menurut Jerry, Permendag 8/2024 tidak berjalan sendirian, tapi juga bersinergi dengan beberapa kementerian lainnya. "Kami itu kementerian



KR-Antara/Maria Cicilia Galuh Jerry Sambuaga

yang di ujung, ketika syarat-syarat teknis sudah selesai, baru diajukan ke kami, kemudian, kami bisa lakukan approval. Ini tentunya harus sinergi antara kementerian/lembaga, jadi nggak bisa kerja sendiri," papar Jerry.

Kemendag, katanya, berupaya maksimal agar tidak

lagi terjadi kendala seperti penumpukan kontainer di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta beberapa waktu lalu. Kemendag juga mendorong agar kementerian-kementerian lain yang berhubungan dengan kebijakan impor untuk mempercepat penerbitan perizinan maupun pertek terhadap pelaku usaha.

"Kami mendorong, mengupayakan teman-teman di kementerian lain lebih cepat, karena pelaku-pelaku usaha, industri kan kadang-kadang membutuhkan kepastian, itu yang kami komunikasi. Jadi tidak hanya di level pimpinan, tapi juga di level teknis, bahkan di level staf-staf untuk memastikan supaya tidak ada kendala," kata Jerry. (Ant)-f

POS INDONESIA DI INDUSTRI LOGISTIK

Transformasi Kunci Hadapi Tantangan

JAKARTA (KR) - Direktur Utama Pos Indonesia (PosIND) Faizal Rochmad Djoemadi mengatakan, transformasi dan inovasi menjadi kunci utama dalam menghadapi tantangan industri logistik di Indonesia.

Menurut Faizal, setidaknya ada enam faktor yang diperlukan untuk mewujudkan proses transformasi yakni *adaptability* (adaptif), *cost leadership* (meminimalkan pengeluaran), *customer satisfaction* (kepuasan pelanggan), *competitiveness* (daya saing), *employee satisfaction* (kepuasan kerja) dan *productivity* (produktivitas). "Jadi transformasi dan inovasi itu saya ukur dengan enam *key success factor*, sehingga dari bulan ke bulan saya memperbaiki," ujar Faizal di Jakarta, Rabu (12/6). Faizal menjelaskan, fak-



KR-Antara/Maria Cicilia Galuh Faizal Rochmad Djoemadi

tor adaptasi diukur berdasarkan seberapa baik layanan PosIND disukai masyarakat, sehingga meningkatkan volume layanan. Dari sisi meminimalkan pengeluaran, dilihat berdasarkan seberapa besar perubahan yang dilakukan dapat mengurangi biaya tetap atau *fixed cost*. Pada kepuasan pelanggan, parameter yang digunakan adalah seberapa puas pelanggan menikmati layanan PosIND.

"Untuk *competitiveness*, apakah *market share*-nya meningkat setelah produknya diperbarui, layanannya diperbaiki, apakah volume penjualannya naik," kata Faizal.

Lebih lanjut, faktor kepuasan kerja juga menjadi prioritas dalam bertransformasi. Faizal menyampaikan, karyawan yang dapat memberikan pelayanan dengan baik, akan membuat pelanggan merasa puas. Dari sisi produktivitas, Faizal memastikan agar perusahaan dapat bekerja dengan efisien dan efektif.

Sementara itu, Faizal juga berbagi pengalaman saat mendapat tantangan untuk memimpin perusahaan plat merah yang sedang mengalami krisis eksternal dan internal, yang terangkum dalam buku 'Thriving on Turbulence: Agile Leadership untuk

Sukses Melewati Disrupsi'. Ada tiga hal yang ia soroti sebagai faktor-faktor yang jadi penyebab merosotnya performa PosIND. Pertama, performansi finansial, di mana perusahaan tersebut mengalami pelemahan finansial. Kedua, performansi bisnis karena kalah saing dengan kompetitor, khususnya di bidang jasa kurir dan logistik. Banyak konsumen yang merasa tidak puas dengan pelayanannya, sehingga menyebabkan *market share* menurun.

Selain itu, PosIND juga mengalami masalah disiplin, di mana para karyawan acuh tidak acuh pada aturan jam kerja. Faizal pun fokus untuk melakukan transformasi bisnis di semua bidang PosIND, di antaranya digitalisasi dan perbaikan layanan. (Ant)-f

PESAN OJK JELANG IDUL ADHA

Waspada Penipuan Kurban Lewat Online

JAKARTA (KR) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengimbau masyarakat untuk mewaspadai penipuan terkait penjualan kurban online jelang perayaan Idul Adha. Walaupun tergolong praktis, namun rentan terhadap penipuan. "Menjelang Idul Adha banyak tawaran kurban secara online, warga masyarakat harus hati-hati dan tidak mudah tergiur penawaran," pesan informasi yang diakses dari OJK di Jakarta, Kamis (13/6). Masyarakat diminta selalu berhati-hati saat ingin membeli hewan kurban se-

cara online agar terhindar dari aksi penipuan. OJK memberikan ciri-ciri penipuan kurban online, yakni harganya sangat murah dibandingkan dengan di pasaran. Kemudian, badan penyalur kurban tidak terdaftar ataupun berizin. Penipuan kurban online juga bercirikan, nomor rekening tidak sama dengan identitas badan penyalur kurban. Oleh karena itu, masyarakat juga perlu mewaspadai penipuan kurban online yang meminta data pribadi seperti kode OTP (*One Time Password*) atau

PIN. Selain itu, penipuan kurban melalui online, juga identik dengan tidak memiliki dokumentasi foto dan video saat proses pemilihan, penyembelihan maupun penyaluran kurban. Dengan demikian, OJK mengingatkan warga masyarakat untuk tidak mudah tergiur dengan penawaran hewan kurban melalui online. Apalagi, untuk menentukan hewan kurban itu memerlukan ketelitian, karena berkaitan dengan ketentuan-ketentuan dalam syariat Islam. (Ant)-f